

EKSISTENSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT

Franky Djafar

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: franky.djafar@umgo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan mengambil setting atau lokasi penelitian di Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pola interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan masih kesulitan dalam menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui sistem perencanaan pembangunan sehingga hasilnya belum dapat memenuhi semua aspirasi yang ada, hal ini dipicu oleh kemampuan aparatur yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan daerah baik dilihat secara teknis, administrasi, analitis maupun dalam bentuk komunikasi belum mampu mendukung pengelolaan aspirasi masyarakat berjalan baik. Faktor pendukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat adanya koordinasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan teknologi informasi, adanya partisipasi stakeholder, dan kewenangan yang dimiliki lembaga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kemampuan dan keterampilan aparatur, minimnya kualitas sumber daya aparatur, Intervensi politik dari penguasa, dominasi elit dalam menetapkan program, serta rendahnya kualitas usulan dari masyarakat.

Kata Kunci: Eksistensi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Aspirasi Masyarakat.

Abstract

This study aims to determine the ability of the Regional Development Planning Agency in absorbing community aspirations in development planning, and the factors that support and hinder it. This research uses qualitative by taking the research setting or location in Gorontalo Regency. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis in this study used analytical techniques with interactive patterns. The results of the study show that the Development Planning Agency still has difficulties in accommodating and accommodating community aspirations through the development planning system so that the results have not been able to fulfill all existing aspirations. in the form of communication has not been able to support the management of community aspirations to run well. Factors supporting the Regional Development Planning Agency in absorbing community aspirations are coordination between stakeholders, availability of information technology, stakeholder participation, and the authority possessed by the institution. While the inhibiting factors are the capabilities and skills of the apparatus, the minimum quality of apparatus resources, political intervention from the authorities, elite domination in setting programs, and the low quality of proposals from the community.

Keywords: Existence, Regional Development Planning Agency, Community Aspirations.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dasawarsa terakhir lembaga perencana sedang menghadapi banyak gelombang tuntutan agar perencanaan pembangunan yang dibuat harus bersifat aspiratif dan akomodatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat lokal. Besarnya tuntutan sebagai konsekuensi logis era reformasi yang menghendaki lembaga terus melakukan perubahan, Tekanan dan tuntutan yang datang dari berbagai pihak, disebabkan oleh keinginan masyarakat agar lembaga selalu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan jasa pelayanannya kepada masyarakat. Semakin besarnya tuntutan tersebut diakibatkan rendahnya kesesuaian tuntutan masyarakat dengan mutu rencana yang dihasilkan yang diakibatkan oleh lemahnya fungsi pengelolaan dan pengkoordinasian dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehingga pembangunan yang telah terjadi kurang mencerminkan tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah aspirasi masyarakat tidak akan terakomodir begitu saja tetapi melalui berbagai tahapan perencanaan yang dibahas melalui para unsur pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu lembaga perencana menjadi sangat penting guna menjembatani berbagai unsur pemangku kepentingan tersebut agar tercapai kesamaan dan kerapian serta keterkaitan dari setiap langkah dan kegiatan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini Theresia *et al* (2015) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan sebuah wadah organisasi yang dapat mengelola bidang perencanaan untuk menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Merujuk apa yang dikatakan theresia diatas bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab pada perencanaan pembangunan. Ditunjuknya lembaga Bappeda Sebagai *agent* masyarakat dalam menjembatani, mengembangkan, dan meningkatkan aspirasi masyarakat tidak serta merta dapat berjalan mulus. Sejumlah persoalan masih saja menyelimuti lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Yang menjadi sorotan utama oleh masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah pada kemampuan aparturnya yang belum menunjukkan potret yang baik, dimana para aparatnya dalam mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dinilai belum mampu mengakomodir usulan masyarakat.

Oleh karena itu tuntutan akan eksistensi lembaga merupakan suatu keharusan, sebagaimana yang di ungkapkan Sjafrizal (2014) bahwa dalam konteks pembangunan daerah lembaga pemerintah daerah merupakan wadah masyarakat untuk melayani masyarakat, segala macam tuntutan yang timbul dari masyarakat tidak lain adalah lambatnya respon lembaga pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Lemahnya kemampuan aparatur yang dimiliki Bappeda dalam menganalisis dan mengidentifikasi aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan, membuat aspirasi masyarakat tidak memiliki daya dobrak yang tinggi dalam mengatasi masalah-masalah masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan Saleh *et al* (2013) bahwa sebagai abdi masyarakat aparatur yang memiliki kredibilitas tidak hanya mampu dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat namun seorang aparatur itu harus memiliki keterampilan secara teknis, analitis, administrasi, komunikasi.

Sejumlah alasan dikemukakan Saleh *et al* (2013) diatas bahwa sebenarnya keterampilan teknis, analitis, administrasi, dan secara komunikasi merupakan kompetensi personal pendukung yang dibutuhkan seorang aparat sebagai petugas abdi masyarakat, karna aparat mempunyai hubungan interaktif yang intensif dengan masyarakat, hal ini jelas relevansinya sangat kuat dengan praktek perencanaan pembangunan daerah, karna sesungguhnya keterampilan aparat tersebut di perlukan untuk menjembatani proses kooordinasi dan mediasi antara pemangku kepentingan dalam menyusun program pembangunan, oleh sebab itu kemampuan aparatur penyelenggaraan pembangunan

mempunyai hubungan kuat dengan eksistensi lembaga Badan Perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat.

Sebagaimana yang disinggung diatas bahwa sesungguhnya kelangsungan hidup masyarakat moderen tergantung pada lembaga kelemahan-kelemahan dalam mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagian berakar pada kondisi lemahnya administrasi pada proses perencanaan, kondisi lemahnya administrasi tersebut Sebagaimana diungkapkan McMurray (2019) bahwa masalah-masalah administratif yang biasanya muncul sewaktu pelaksanaan adalah masalah tipe personil, dan keuangan, sedangkan Graeme and, David, (2003) menyatakan bahwa pembangunan tidak akan mulus pelaksanaannya sebagian berakar dari Kemampuan sumber daya manusia, kemampuan teknologi, dan kemampuan keuangan

Oleh karenanya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dibutuhkan suatu lembaga yang dapat memanajemeni, sebab tanpa adanya Lembaga perencana dan administrasi sebuah perencanaan hanya akan terlihat sebagai konsep kosong, yang notabene tidak ada hubungannya dengan kenyataan yang ada. Demikian Juga untuk masyarakat bahwa lembaga merupakan wadah bagi mereka untuk mencapai tujuan, pentingnya lembaga ini pula sebagaimana dinyatakan McMurray (2019) bahwa masyarakat harus memahami lembaga dan memanfaatkannya dengan baik, karena lembaga diperlukan untuk mencapai kemaslahatan peradaban, lembaga diperlukan untuk menciptakan perdamaian.

Memperhatikan berbagai persoalan diatas terkait dengan keberhasilan penyerapan aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan, hal ini jelas sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga Bappeda dalam menjalankan fungsi-fungsinya sehingga untuk mendapatkan hasil optimal dalam pelaksanaannya diperlukan tindakan nyata lembaga dalam melakukan koordinasi yang tepat.

Berangkat dari yang diatas Kondisi seperti ini tentunya harus disikapi secara serius karena jika tetap dibiarkan berlarut-larut akan merangsang terjadinya inkonsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan kebutuhan pembangunan daerah. Dari uraian dan penjelasan di atas, fenomena dan penilaian tersebut mungkin benar terjadi secara umum yang terjadi di kabupaten gorontalo. Namun kiranya perlu dilakukan penelitian untuk menemukan fakta yang sesungguhnya terjadi di kabupaten gorontalo berkaitan eksistensi lembaga Bappeda dalam menyerap aspirasi masyarakat, agar dapat dilakukan tindakan pencegahan atau perbaikan sesegera mungkin atau jika dirasa perlu dapat disusun suatu mekanisme perencanaan yang baru yang lebih baik (partisipatif) dan *applicable* yang lebih mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan dalam mengelola aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan Badan perencanaan pembangunan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan terus menerus menganalisis pembangunan daerah. Anggara (2014:3) mendefinisikan pembangunan sebagai proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Pada dasarnya pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan

dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom (Mahi, 2017).

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan sebuah aktifitas yang sangat penting dalam proses pembangunan. Winston Churchill, si ahli strategi dalam perang dunia ke II mengatakan bahwa *"if you fail to plan, you are bound to fail"*. Kegagalan dalam merencanakan sama halnya dengan kita merencanakan sama halnya dengan kita merencanakan kegagalan itu sendiri Nugroho *et al* (2011:2). Perencanaan rasional Dalam pandangan faludi (1973), yaitu terdiri dari teori prosedural dan substantif. Dimana teori prosedural seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan teori substantif sebagai pendukung teori prosedural. Tetapi kenyataannya teori substantif berperan lebih besar melalui metode analisis yang diserap oleh teori prosedural. Faludi menganggap teori substantif menjadi perhatian yang dapat dilihat langsung dari ilmu sosial kemasyarakatan dimana peran partisipasi masyarakat lebih dikedepankan, karna apa yang telah terjadi di masyarakat dimasukan dalam teori perencanaan.

Dari pemikiran faludi diatas (1973) bahwa pada perkembangannya sering kali teori perencanaan cenderung pada prosedural ketimbang substantif. Para perencana dikalangan pemerintah tidak sadar banyak dipengaruhi oleh teori prosedural atau yang bersifat teknokratis yang sering mengabaikan perencanaan yang bersifat substantif. Kondisi ini akan berdampak pada isi dari pada perencanaan yang kurang merespon dan mneyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, di dalam pelaksanaannya juga kurang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan. Justru diharapkan akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh faludi (1973) disebut sebagai perencanaan yang efektif.

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari pandangan (1) yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam suatu wilayah administrasi dalam rangka pembangunan daerah. Menurut pandangan ini pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan oleh pemerintah pusat di daerah sehingga masyarakat di daerah tidak mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib sendiri dan (2) munculnya kebijakan pemerintah nasional yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi Sjafrizal (2014:26)

3. Eksistensi Lembaga Dalam Pembangunan

Eksistensi menggambarkan berbagai aspek lembaga yang tidak berwujud sebagai fokus perhatian stakeholder, lembaga yang menjadikan orang tertarik, dan budaya yang mengarahkan perilaku aktornya. Kemampuan yang dimiliki merupakan identitas lembaga, menunjukkan pola penanganan sumber daya manusia, dan faktor utama yang menentukan penerapan strategi lembaga dalam pembangunan (Grespecher 2014: 17;). Menurut Efendhi (2016: 19), struktur lembaga dan sistem hubungan kerjasama yang terbangun merupakan komponen utama bagi kompetensi lembaga. Bagi lembaga pemberdayaan menjadi sarana penghubung oleh masyarakat dalam pembangunan yang berbasis kepada masyarakat sehingga untuk mencapai eksistensinya lembaga harus mampu memperlihatkan performanya akan hasil kerja, seperti yang dijelaskan oleh Theresa (2015) yang terdiri dari empat dimensi peran yakni (1) Lembaga sebagai fasilitator, (2) lembaga sebagai mediator, (3) lembaga sebagai motivator dan (4) lembaga pemberdayan masyarakat sebagai dinamistator bagi pembangunan tersebut.

Eksistensi merupakan identitas lembaga, dilihat dari Kontribusi lembaga dalam kegiatan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsinya menurut Theresia *et al* (2015) dapat dilihat melalui empat parameter yakni (1) lembaga sebagai fasilitator, (2) lembaga sebagai mediator, (3) lembaga sebagai motivator dan (4) lembaga sebagai dinamisator bagi

pembangunan. Cara pandang yang berbeda tentang Eksistensi lembaga juga disampaikan oleh Manninen dan Viitara (2007:42) bahwa kunci eksistensi lembaga untuk menghasil keunggulan kompotitif terdapat pada manusia yang memiliki tiga produk yakni kompetensi, motivasi, mental, jika satu faktornya nol maka produk adalah nol. Selain ketiga produk tersebut, Manninen dan Viitara (2007:45) lebih menekankan bahwa aspek manusia dalam lembaga sebagai *human capital aspect*, yakni begitu pentingnya aspek manusia dalam lembaga sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa dukungan aparatur yang sehat maka lembaga itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

4. Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan Daerah, mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Disamping itu, adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setelah revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UUN omor 32 Tahun 2004 dan terbitnya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fungsinya berdasarkan peraturan meteri dalam negeri no 86 tahun 2017 yakni:

1. Membangun mekanisme perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan orang miskin
2. Membangun transparansi proses penganggaran
3. Membangun sistem pengawasan dan implementasi program serta partisipatif
4. Menyusun rencana program/proyek untuk tahun yang akan datang
5. Melaksanakan program/proyek yang sedang berjalan yang termasuk dalam bidang tugasnya dan mengendalikan program/proyek yang dilaksanakan oleh instansi/dinas yang bersangkutan.
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/proyek tahun sebelumnya.

5. Kemampuan Lembaga

Menurut Mackay (2007:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksplorasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam lembaga, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Bersamaan dengan itu Rangriz *et al* (2015) menerangkan bahwa Kapabilitas merepresentasikan apa yang diketahui tentang lembaga, apa yang baik untuk dikerjakan dan bagaimana pola kegiatan itu bermanfaat. Kapabilitas menggambarkan berbagai aspek lembaga yang tidak berwujud sebagai fokus perhatian stakeholder, merek lembaga yang menjadikan orang tertarik, dan budaya yang mengarahkan perilaku aktornya. Kapabilitas merupakan identitas lembaga menunjukkan pola penanganan sumber daya manusia, dan faktor utama yang menentukan penerapan strategi lembaga. Sedangkan lembaga adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga menurut Mackay (2007: 25) adalah suatu entitas sosial relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama. Manninen dan Viitara (2007) menyatakan bahwa kita dilahirkan dalam lembaga,

dididik oleh lembaga, dan hampir semua diantara kita menghabiskan hidup kita bekerja untuk lembaga. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa lembaga adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan bekerja terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Merujuk penjelasan baik kemampuan & lembaga di atas, Macmuray (2019) mengemukakan kapabilitas lembaga adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Dengan memanfaatkan sumber daya teknologi dalam mendukung sumber daya manusia, Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam lembaga. diintegrasikan sesuai tujuannya, untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu, atau sejumlah tugas yang diharapkan. Sehingga dengan demikian kapabilitas menunjukkan kemampuan lembaga memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber dayanya.

Menurut saleh *et al* (2013) fondasi penting dari kemampuan lembaga terletak pada manusia yang dilihat dari 4 unsur yaitu, kemampuan Teknis, kemampuan administrasi, kemampuan analitik, dan kemampuan komunikatif, sedangkan dimensi yang terakhir adalah *characteristics*, dilihat dari sikap, dari uraian dimensi diatas berkaitan langsung dengan sumber daya manusia, namun kemampuan lembaga bukan hanya dilihat dari sumber daya manusia saja, tetapi harus didukung okeh kemampuan teknologi dan kemampuan keuangan. Sementara dalam pandangannya Manninen dan Viitara (2007) kapabilitas lembaga dapat dipahami sebagai kemampuan lembaga untuk melakukan atau mempelajari hal tertentu. Kapabilitas lembaga merujuk pada efisiensi prosedur pemecahan masalah yang diterapkan dalam bidang tertentu; kemampuan menerapkan pengetahuan dan menguasai teknologi yaitu berupa metode produksi dan manajemen, intelijensi lembaga, dan permintaan pelanggan. Hal yang sama diungkapkan Sudarso (2011:52) bahwa kapabilitas lembaga yaitu kapasitas lembaga dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh Lembaga. kapabilitas lembaga memerlukan berbagai keahlian individual yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya.

6. Partisipasi Masyarakat

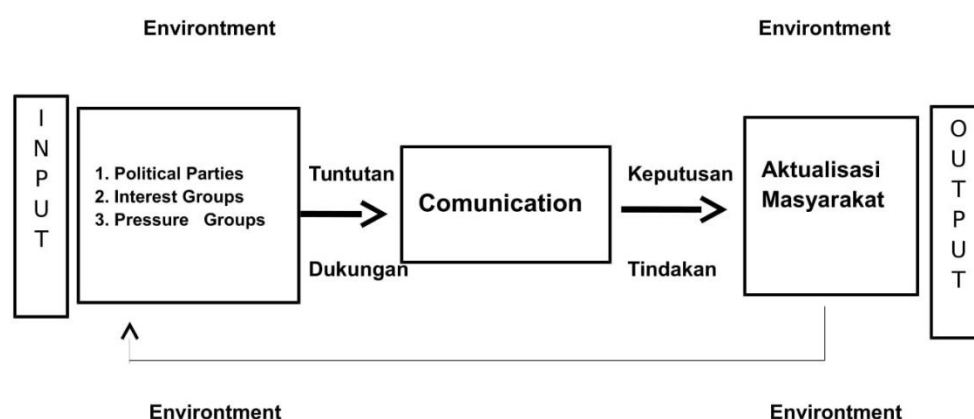
Dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan maupun dalam implementasi kebijakan tertentu akan membuat setiap program menjadi terukur dan tepat sasaran karena program-program yang dihasilkan mepresentasikan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan proses pelibatan masyarakat dalam pembangunan maka tentunya pelibatan masyarakat ini sangat penting dalam proses pemerintahan. Mengenai arti penting partisipasi dalam proses pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan oleh korten dalam muluk bahwa “betapa pentingnya partisipasi dalam berbagai proses pembangunan sehingga pembangunan dapat dijalankan untuk meningkatkan martabat manusia sebagaimana yang tertuang dalam gagasan dasarnya *people centered development*” (Muluk, 2009:5). Merujuk pada pendapat korten dalam muluk ini tentunya mau tidak mau pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan. Hal ini tidak hanya mempermudah proses perencanaan, perumusan dan implementasi sebuah progra tapi hal ini juga menjadi sangat penting karena akan menentukan ketepatan sebuah program. pakar lain yang Seperti Berman (2017) mengungkapkan tentang betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah Burns, Hambelton dan Hogget. Mereka menunjukan bahwa pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan daerah (Berman:2017:5)

7. Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Aspirasi diartikan sebagai tujuan untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Untuk itu Hamdi (2014) menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan representasi dari perencanaan pembangunan yang seharusnya mendapat tempat besar dalam pembagian alokasi

anggaran pembangunan. Namun dalam pandangan Hadi (2014) hal ini bukan perkara mudah untuk menyatukan aspirasi berbagai kelompok sehingga secara mudah dapat dianggarkan, memang aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat secara umum, seyogyanya dijadikan salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh pemerintah, walaupun aspirasi masyarakat cermin dari demokrasi namun tidak begitu saja lahir, tetapi sebagai negara yang berdemokrasi, Partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari bagian kehidupan berbangsa dan bernegara

Perumusan kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok secara terus menerus agar pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan memberikan respons terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut (*group pressures*) yaitu dengan melakukan tawar-menawar (*bargaining*), perjanjian (*negotiating*) dan kompromi (*compromising*) terhadap kepentingan persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan lain yang berpengaruh, partai politik yang secara kelembagaan lebih besar dan mampu mempengaruhi segala aspek Peran dalam mengambil keputusan dan kebijakan juga merupakan hak dan fungsi dari partai politik sendiri. Sedangkan kelompok kepentingan dan kelompok penekan hanya mewakili golongan tertentu. Struktur politik sebagai penyerap aspirasi masyarakat sangat memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan publik di masyarakat melalui sistem politik. Hal ini dapat digambarkan dalam System Theory, Dye (1992):



Gambar 1. Pola Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Bentuk Teori Sistem

Sumber: Dye (1992)

Di dalam konsep ini aktivitas politik digambarkan dalam ilustrasi diatas. Bahwa Komunikasi partai politik merupakan hal dasar yang akan mempengaruhi masyarakat oleh sebab partai politik mengaktualisasikan aspirasi masyarakat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan untuk menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat secara aspiratif, maka Komunikasi yang dimaksud akan berbanding lurus dengan *feedback* yang timbul di masyarakat. Walaupun demikian, partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan, memainkan peran sangat essensial dalam menjamin kelangsungan suatu sistem politik. Dalam hal ini ketiga kelompok berperan penting dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi politik masyarakat adalah adanya input yang berbentuk aspirasi masyarakat yang secara teknis dapat dikatakan sebagai tuntutan dan dukungan.

C. METODE

Penelitian ini dilakukan pada Badan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini

menggambarkan secara komprehensif dan mendalam mengenai kemampuan perencanaan dalam menyerap aspirasi masyarakat (Creswell (2010:4). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) seperti yang dikembangkan oleh Miles, Hebermen & Saldana dengan prosedur: Pengumpulan data, Kondensasi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman & Saldana, 2014:20).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo

Kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Peran Lembaga Secara Teknis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satuan teknis pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah sudah selayaknya memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat di Kabupaten Gorontalo, kontribusi tersebut diwujudkan dengan cara memaksimalkan kemampuan Bappeda untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodir baik, sebagai penunjangnya adalah memberikan ruang aspirasi secara teknis yang diperlukan untuk melembagakan pola koordinasi penyerapan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. Sejauh ini Bappeda dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan sebagai forum koordinasi antar pemangku kepentingan, hanya saja dalam forum tersebut belum dapat menghasilkan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan masyarakat telah memberikan usulannya namun tetap saja belum terserap dengan baik dalam program pembangunan.

Berdasarkan fakta di atas bahwa pemicu pengelolaan aspirasi belum berjalan baik disinyalir karena kemampuan aparatur yang dimiliki Bappeda kurang baik, hal ini sering ditunjukkan oleh ketidakmampuan aparat dalam mengidentifikasi, mengoreksi maupun memberikan masukan pada usulan masyarakat sehingga menjadikan kualitas usulan masyarakat menjadi rendah dan sulit untuk terserap, sebagaimana yang diungkapkan oleh Manninen dan Viitara (2007:42) bahwa kunci eksistensi lembaga untuk menghasilkan keunggulan kompetitif terdapat pada manusia yang memiliki tiga produk yakni kompetensi, motivasi, mental, jika satu faktornya nol maka produk adalah nol. Selain ketiga produk tersebut, Manninen dan Viitara (2007:45) lebih menekankan bahwa aspek manusia dalam lembaga sebagai *human capital aspect*, yakni begitu pentingnya aspek manusia dalam lembaga sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa dukungan aparatur yang sehat maka lembaga itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Tidak hanya itu masalah lain juga timbul pada saat pelaksanaan diskusi forum perencanaan pembangunan dimana dominasi para elit dalam menyampaikan programnya masih sangat kuat, sama halnya yang diungkapkan Namun dalam pandangan Hadi (2014) dalam diskusi bukan perkara mudah untuk menyatukan aspirasi berbagai kelompok, walaupun aspirasi masyarakat cermin dari demokrasi namun tidak begitu saja lahir, tetapi sebagai negara yang berdemokrasi, Partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari bagian kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menyatukan pendapat dari berbagai kelompok kepentingan seharusnya pemandu diskusi yang telah ditunjuk Bappeda harus mampu mendorong masyarakat memberikan pendapat dan gagasannya terkait dengan berbagai permasalahan pembangunan yang pada akhirnya prinsip keberpihakan dan keadilanpun tidak nampak dalam penyelenggaraan musrenbang.

Dari persoalan di atas tentu kemampuan aparat penyelenggaraan pembangunan mempunyai hubungan kuat dengan kemampuan lembaga Bappeda dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu syarat yang perlu dimiliki aparat harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola forum, memahami isu dan masalah pembangunan berskala daerah, serta dapat membangun kesepakatan antar sesama stakeholder. Selama ini Kemampuan aparat dalam menggali informasi dari masyarakat serta menyatukan berbagai benturan kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai stakeholder pada saat musyawarah sulit dilakukan dengan baik, hal ini karena tidak disokong oleh aparat yang mempunyai kemampuan di bidang manajemen perencanaan pembangunan, karena sebagian besar aparat yang berada di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gorontalo lebih banyak dari bidang ilmu sosial lainnya.

b. Peran Lembaga secara Administrasi

Administrasi memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan, Fungsi administrasi yang dilakukan Bappeda Kabupaten Gorontalo dapat dinilai melalui kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berbagai format yang dilakukan lembaga Bappeda Kabupaten Gorontalo untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah baik itu melalui kegiatan forum konsultasi publik hingga musyawarah perencanaan pembangunan, Kegiatan itu merupakan salah satu pintu untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Kendati demikian Kemampuan administratif Bappeda dalam menyerap aspirasi masyarakat tetap harus lebih ditingkatkan, karena selama ini banyak pihak menganggap jasa layanan yang diberikan lembaga Bappeda masih saja mengabaikan aspirasi, serta kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa sesungguhnya masyarakat menginginkan proses penyampaian aspirasi dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses, bersamaan dengan hal itu organisasi Bappeda juga harus memastikan aspirasi dapat benar-benar terakomodir dengan baik dalam rencana pembangunan daerah, sebagaimana yang ditekankan oleh Saleh *et al* (2013) untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif diperlukan keseimbangan antara kebutuhan administrasi dan tekanan politik yang terjadi agar aspirasi masyarakat dapat dikekal oleh Lembaga dengan baik.

Saat ini lembaga Bappeda kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan layanannya telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, berbagai aplikasi online telah diluncurkan dalam rangka menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, hanya saja dalam pelaksanaannya belum semua mendapat respon positif dari masyarakat, hal tersebut akibat lambatnya respon aplikasi online tersebut dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan, lambatnya respon aplikasi ditengarai oleh aparat yang menangani sistem tersebut, tingkat kemahirannya memang masih sangat terbatas, dimana aparat yang awalnya mengelola data yang biasanya menggunakan pola administrasi secara manual, kemudian bergeser pada pengelolaan secara online yang menuntut adanya kecepatan yang luar biasa dari para petugasnya untuk melakukan analisis dan telaahan dalam penyaluran aspirasi masyarakat pada setiap bidang, sehingga membuat aparat begitu lambat menyesuaikan dirinya dalam kondisi pekerjaannya saat ini, yang akhirnya hal tersebut membuat pelayanan aspirasi masyarakat kurang begitu cepat untuk ditangani.

c. Kemampuan Lembaga dalam menganalisis

Pada saat pekerjaan di lapangan lembaga Badan Perencanaan pembangunan Daerah banyak dituntut untuk dapat menganalisis perkembangan situasi atau lingkungan masyarakat dalam rangka mengaktualisasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara maksimal. Oleh sebab itu kemampuan analitis yang dimiliki Bappeda memang sangat bernilai dalam memprediksi maupun mempertajam aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan. Hanya saja penggunaan kemampuan analitis sebagai pisau mempertajam aspirasi belum dapat berjalan optimal, hal ini dikarenakan belum mempunyai para aparat Bappeda dalam menganalisis usulan secara komprehensif terhadap situasi yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan kecenderungan dalam mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Kondisi tersebut akibat dari kurang meratanya kapasitas analitis sumber daya aparatur perencana yang dimiliki lembaga Bappeda, dimana tidak semua aparat mempunyai kemampuan yang dapat mengidentifikasi serta memecahkan persoalan perencanaan pembangunan daerah yang menyangkut dengan berbagai tuntutan maupun aspirasi masyarakat. Namun kendala tersebut di atas rupanya tidak hanya datang dari petugas aparat saja tetapi kendala juga datangnya dari masyarakat, dimana usulan program yang masyarakat sampaikan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan belum dapat mencerminkan potensi wilayahnya mengingat kondisi wilayah sangat penting dalam menilai berbagai kebutuhan. Sebagaimana pemikiran Faludi (1973) dalam teori perencanaan bahwa mengatakan bahwa sering kali teori perencanaan cenderung pada prosedural ketimbang substantif. Para perencana dikalangan pemerintah tidak sadar banyak dipengaruhi oleh teori prosedural atau yang bersifat teknokratis yang sering mengabaikan perencanaan yang bersifat substantif. Kondisi ini akan berdampak pada isi dari perencanaan yang kurang merespon dan mneyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, di dalam pelaksanaannya juga kurang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan. Justru diharapkan akan membentuk suatu kelaborasi yang oleh faludi (1973) disebut sebagai perencanaan yang efektif.

Berbagai upaya analitis yang telah dilakukan lembaga Bappeda dengan melihat kondisi sosial masyarakat maupun potensi wilayah di Kabupaten Gorontalo, sehingga membaginya menjadi 4 Zonasi di Kabupaten Gorontalo, yang tiap zonasi terdiri dari beberapa kecamatan, zonasi pertama itu lebih terfokus pada pusat penghasil pangan, kedua sebagai pusat perdagangan, ketiga pusat penghasil perikanan, dan yang keempat sebagai pusat penghasil ternak. Namun dalam implementasi pembagian zonasi tersebut kepada masyarakat masih banyak dihadapkan berbagai kendala sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Ketidakselarasan usulan masyarakat dengan potensi wilayah menjadi pemicu analitis lembaga Bappeda tidak berjalan dengan baik, serta belum di dukung oleh para aparat perencana yang mampu mengklasifikasikan aspirasi di tiap bidang baik itu yang menjadi proritas maupun yang tidak menjadi prioritas untuk disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan atau anggaran yang ada dari daerah, sehingga hal ini jelas sangat berpengaruh pada daya serap aspirasi masyarakat.

d. Kemampuan Lembaga Dalam Berkomunikasi

Kemampuan komunikasi lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu faktor penentu program pembangunan, kemampuan komunikasi di perlukan untuk menjembatani proses mediasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah maupun stakeholder yang lain. Untuk mempertemukan berbagai kepentingan tersebut maka dibutuhkan peran komunikasi sebagai instrumen mediasi agar pembangunan tetap berlangsung dalam kontrol bersama. Hingga saat ini Komunikasi yang dilakukan lembaga Bappeda Kabupaten Gorontalo dalam menyerap aspirasi masih saja dihadapkan berbagai masalah baik itu yang datangnya dari sikap masyarakat yang selalu menuntut apa yang mereka inginkan serta benturan kepentingan berbagai pihak yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan Efendhi (2016:19) bahwa struktur lembaga dan sistem hubungan kerjasama yang terbangun merupakan komponen utama bagi kompetensi. Bagi lembaga pemberdayaan menjadi sarana penghubung oleh masyarakat dalam pembangunan yang berbasis kepada masyarakat sehingga untuk mencapai eksistensinya lembaga harus mampu memperlihatkan performanya akan hasil kerja

Merujuk permasalahan yang terjadi membuat Bappeda Kabupaten Gorontalo harus memberikan solusi bagi setiap permasalahan serta memperkenalkan ide-ide maupun penemuan-menemuan baru dari masyarakat untuk dijadikan sumber kekuatan dan potensi untuk mendukung suksesnya pembangunan, dengan cara menugaskan aparatnya disetiap melaksanakan kegiatan perencanaan maupun dalam bersosialisasi pada masyarakat. Hanya saja upaya tersebut di atas tidak di dukung oleh aparat yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, hal tersebut bisa dirasakan masyarakat dimana pesan yang disampaikan aparat tentang program pembangunan terkadang belum dapat dipahami oleh masyarakat secara jelas, sehingga membuat pesan yang ditafsirkan masyarakat menjadi berbeda, belum lagi kurangnya kepekaan aparat terhadap kondisi sosial masyarakat maupun lingkungan masyarakat, menjadikan program yang ditawarkan belum dapat diterima oleh masyarakat.

Oleh sebab Saleh *et al.* (2013) menyarankan agar dalam menjalankan perencanaan tidak hanya membutuhkan aparat perencana yang mengerti tentang teknik dan metode yang digunakannya saja namun harus di tunjang kemampuan komunikasi secara lisan. Saat ini masih banyak aparat yang diandalkan Bappeda belum mampu bertindak memberikan kesepahaman antar stakeholder pada saat dialog, sehingga aparat yang turun kelapangan kurang ternilai karna belum mampu mendorong aspirasi masyarakat. Oleh karna itu sebagai aparat yang menjadi garda terdepan pelayanan publik secara ideal harus memiliki kemampuan komunikasi lisan karna merekalah yang banyak berinteraksi dengan para stakeholder.

2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo

Faktor pendukung kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo diantaranya adalah:

a. Adanya koordinasi antar pemangku kepentingan

Dalam rangka menghasilkan perencanaan yang baik dan matang, serta dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gorontalo tidak lepas koordinasi yang dilakukan lembaga Bappeda. Adanya koordinasi yang terjalin yang dilakukan oleh lembaga Bappeda, dapat dilihat pada saat pelaksanaan rapat koordinasi dengan para stakeholder, adanya saling ketergantungan baik dari masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak terkait sehingga terjalin suatu koordinasi yang baik, dimana antar sesamanya saling memberikan informasi dan saling tukar menukar informasi sehingga dapat membantu lembaga Bappeda dalam menyerap dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda agar terarah pada tujuan tertentu.

b. Ketersediaan Teknologi Informasi

Kemajuan di bidang teknologi informasi memang sangat membantu Bappeda Kabupaten Gorontalo untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pembangunan sehingga pemerintah melalui sistem informasi tersebut berharap besar untuk dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan baik. Ketersediaan teknologi informasi dapat juga memudahkan pelayanan publik untuk setiap instansi pemerintah dalam mengidentifikasi secara langsung keinginan dan kebutuhan masyarakat. Wujud dari berkembangnya teknologi informasi perencanaan pembangunan yaitu dengan munculnya beberapa aplikasi secara online yang telah di terapkan lembaga Bappeda Kabupaten Gorontalo yang fungsinya tidak lain sebagai sarana pengaduan aspirasi masyarakat, aplikasi tersebut diantaranya adalah E-planning dan aplikasi Lapor aspirasi masyarakat yang dapat memudahkan Bappeda dalam mendata aspirasi masyarakat. Sebagaimana proses kerja aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah

menyampaikan aspirasinya tanpa proses yang rumit, pemerintah pun bisa mengetahui aspirasi dan keluhan masyarakat secara cepat dan akurat.

c. Adanya partisipasi stakeholder dalam penyusunan program

Adanya proses interaksi, komunikasi, dan diskusi dalam menyerap aspirasi masyarakat merupakan sebuah bukti bahwa kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo tidak terlepas dari keterlibatan stakeholder, andilnya stakeholder tersebut guna menghasilkan aspirasi yang bermanfaat buat masyarakat, maka untuk mencapai aspirasi yang berkualitas Bappeda Kabupaten Gorontalo sebagai koordinator tunggal perencanaan pembangunan di daerah memanfaatkan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagai media interaktif semua stakeholder untuk menetapkan program pembangunan. Kehadiran perwakilan dari dinas maupun DPRD, maupun perwakilan dari masyarakat memiliki tingkat pengaruh yang lebih tinggi, Walaupun dalam pelaksanaan musrenbang intensitas komunikasi begitu tinggi yang memuat berbagai kepentingan, namun dengan dukungan peran stakeholders dalam perencanaan pembangunan membuat fungsi Bappeda sebagai koordinator pembangunan berjalan optimal. Sebagaimana yang di ungkapkan Berman (2017) bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

d. Mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder penyusunan rencana program kegiatan

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Sedangkan faktor penghambat kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo diantaranya adalah:

a. Faktor kemampuan dan keterampilan aparatur

Belum nampaknya kreatifitas dan respon aparatur Bappeda Kabupaten Gorontalo dalam menjangring aspirasi masyarakat masih saja menjadi perhatian berbagai pihak, bentuk kemampuan aparat dalam mengenali kebutuhan masyarakat belum menunjukan potret yang baik, dimana kemampuan aparat untuk menyatukan, memadukan dan mengkombinasikan berbagai komponen dalam rancangan kegiatan pembangunan daerah belum cukup baik sehingga program yang disusun tidak peka pada kebutuhan-kebutuhan desa, demikian juga pada keterampilan aparat dalam mengidentifikasi program baik program yang sangat mendesak, yang menjadi prioritas, maupun yang tidak menjadi prioritas masih sangat lemah sehingga pembangunan yang terjadi belum merata.

b. Minimnya kualitas sumber daya aparatur

Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki lembaga Bappeda dalam menunjang kegiatan proses kegiatan pembangunan masih kurang sedangkan Kebutuhan jumlah tenaga fungsional perencana pembangunan di di setiap sektor adalah besar. Hanya saja Banyak aparat yang ditempatkan belum memenuhi harapan antara lain adalah dari tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang minim sehingga belum dapat mendukung sehingga program/kegiatan yang diusulkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat belum terealisasi dengan baik. Dari jumlah kecamatan sebanyak 19 dan jumlah desa 205 apabila dibandingkan dengan kesiapan aparat yang dimiliki bappeda saat ini memang sangat minim dari mengkompilasi berbagai usulan dari berbagai

stakholder, dari fakta yang ada Jumlah aparat perencana yang dimiliki organisasi Bappeda yang sesuai bidang kompetensinya sebanyak 5, sedangkan tenaga operasional data 2 orang, sedangkan aparat yang lainnya sebanyak 18 belum sesuai kompetensi yang di harapkan, sebagian besar aparat masih minim pengetahuan dibidang manajemen perencana pembangunan, karna sebagian besar aparat di Bappeda Kabupaten Gorontalo lebih banyak dari bidang ilmu sosial, fenomena tersebut terjadi karna akibat dari berbagai mutasi atau perpindahan yang dilakukan pemerintah daerah, yang pada akhirnya kondisi tersebut, mengakibatkan pengelolaan penyelenggara kegiatan memunculkan banyak kelemahan diantaranya adalah banyak melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat, hal ini karna akibat dari aparat yang tidak bisa memilih dan memilih mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang bersifat keinginan, ketidak optimalnya pengkajian aspirasi masyarakat secara teknis membuat kejelasan usulan masyarakat tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan masyarakat,

c. Intervensi politik dari penguasa

Bappeda sendiri sebagai unit bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengsinergitaskan serta meyelaraskan usulan dari berbagai pihak telah berupaya melakukan berbagai tahapan musyawarah perencanaan pembangunan, akan tetapi musyawarah tersebut dianggap masyarakat hanya sebatas “formalitas” atau sebagai alat legitimasi suatu perencanaan yang melibatkan masyarakat saja. berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan kedalam pada anggaran, karena pada umumnya aspirasi masyarakat setelah masuk ke pemerintah paling atas seringkali dipangkas, bahkan sering diganti dengan program hasil perselingkuhan antar pihak penguasa, kuatnya intervensi politik ini membuat ruang gerak lembaga Bappeda sangat terbatas hanya sebagai penyelenggara teknis saja tidak dapat mempengaruhi hasil keputusan karena disebabkan struktur dan prosedur kerja masih dibawah bayang-bayang oleh eksekutif atau Bupati. Padahal sejatinya keberadaan lembaga Bappeda mandiri tidak boleh bergantung pada pimpinan pemerintah, kondisi ini membuat lembaga Bappeda tetap berada pada sistem yang akan selalu dihadapkan dari berbagai tekanan dari penguasa. Seharusnya kondisi politik harus lebih memihak pada Lembaga sebagaimana yang diungkapkan Dye (1992) struktur politik sebagai penyerap aspirasi masyarakat sangat memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan publik di masyarakat melalui sistem politik.

d. Dominasi elit dalam menetapkan program

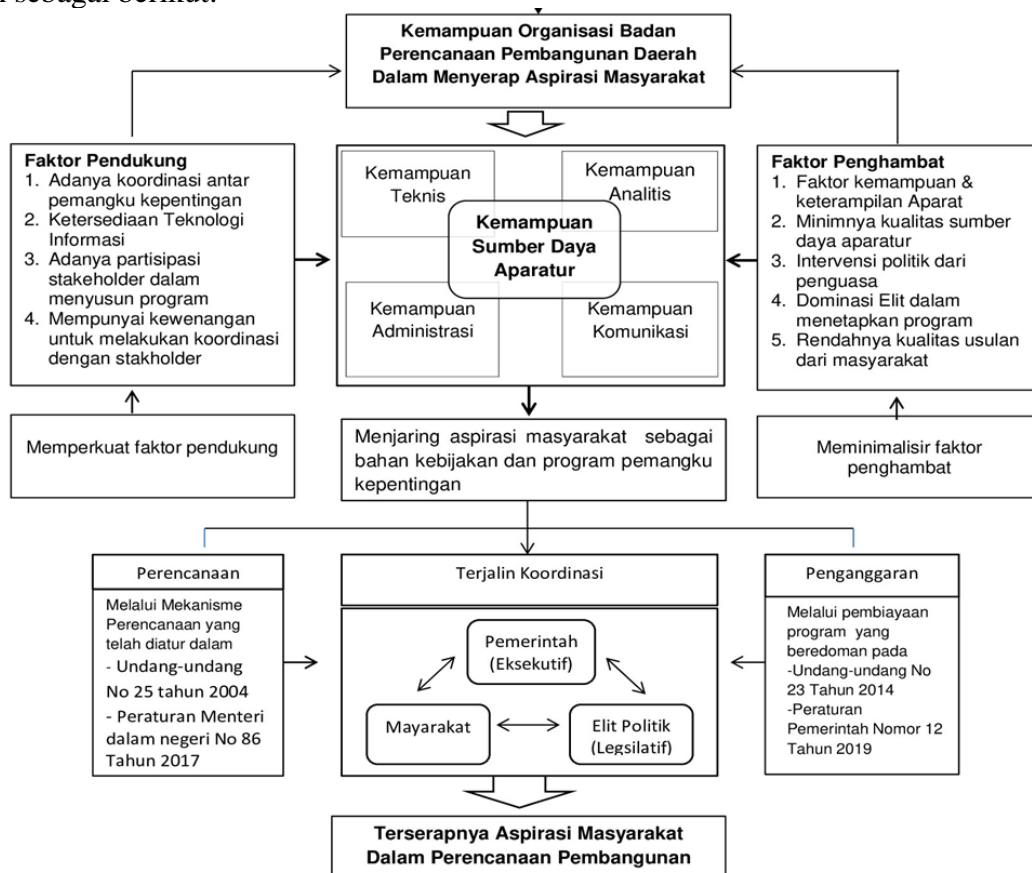
Kuatnya kepentingan elit sehingga sering mendominasi usulan dalam musrenbang, Penyampaian aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang masih di dominasi stakeholder tertentu dalam menyampaikan aspirasinya, Sehingga kerap kali memunculkan ketidakseimbangan dalam menyampaikan aspirasi yang pada akhirnya pelaksanaan musrenbang tidak berjalan baik, Pelaksanaan perencanaan masih seraf akan unsur politik kuatnya intervensi politik sehingga membuat ruang gerak Bappeda sangat terbatas hanya sebagai penyelenggara teknis saja, tidak dapat mempengaruhi hasil keputusan karena disebabkan struktur dan prosedur kerja masih dibawah bayang-bayang oleh eksekutif atau Bupati. Demikian juga masyarakat tidak dapat berbuat banyak karna dominasi para elit politik atau penguasa masih sangat dominan dalam menetapkan kebijakan program pembangunan. kecenderungan itu terlihat pada saat diskusi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, dimana dari unsur elit-elit tertentu yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan semakin aktif saja dalam menyampaikan programnya. Yang pada akhirnya keputusan-keputusan yang

dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah secara seimbang sehingga program yang dihasilkan banyak yang belum mencerminkan aspirasi masyarakat

e. Rendahnya kualitas usulan dari masyarakat

Rendahnya kualitas usulan masih menjadi faktor yang mempengaruhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sulit terserap dengan baik, hampir setiap tahun usulan masyarakat masih jauh dari sempurna. Ketidaktahuan masyarakat akan perannya dalam pembuatan keputusan dan kurangnya informasi yang dimiliki menyebabkan kualitas program yang diusulkan sangat rendah. Akibatnya, masyarakat melalui perangkat desa berlomba-lomba untuk membuat usulan program kegiatan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan program tersebut, kecenderungan keinginan daripada kebutuhan masyarakat membuat usulan yang disampaikan banyak sekali, padahal ukuran terakomodirnya usulan bukan dilihat dari banyaknya usulan namun dari kualitas usulannya, kecenderungan keinginan daripada kebutuhan masyarakat membuat usulan yang disampaikan sangat banyak membuat usulan tersebut menumpuk sehingga membuat Lembaga Bappeda Kabupaten Gorontalo kesulitan memetakan usulan mana yang mendesak, menjadi prioritas dan yang tidak menjadi prioritas. Sedangkan fasilitasi yang dilakukan fasilitator kelurahan maupun desa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan belum cukup meningkatkan kualitas usulan.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan sebuah rekomendasi dalam bentuk model rekomendasi kemampuan lembaga Badan perencanaan Pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan daerah. adapun model rekomendasinya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Model Rekomendasi Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat pada perencanaan Pembangunan

E. KESIMPULAN

Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengelola aspirasi masyarakat melalui perannya secara teknis, analitis, administrasi, dan komunikasi sudah dilakukan Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan, hanya saja untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan baik dalam rencana kerja pemerintah daerah masih saja diselimuti sejumlah persoalan seperti, lemahnya kemampuannya dalam mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Persoalan tersebut terjadi karna Bappeda Kabupaten Gorontalo belum didukung oleh aparat yang mempunyai keterampilan yang mempuni dalam perencanaan pembangunan mengakibatkan pembangunan yang dijalankan tidak terealisasi sesuai dengan yang di inginkan. tidak semua aparat mempunyai kemampuan yang dapat mengidentifikasi serta memecahkan persoalan perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam aspirasi masyarakat. Minimnya aparat perencana yang mempunyai kompetensi sesuai bidang perencanaan pembangunan membuat Organisasi Bappeda memanfaatkan aparat yang mempunyai bidang ilmu sosial yang lain untuk mengantisipasi kekosongan, karna sebagian besar aparat yang mempunyai kompetensi sudah termutasikan ke instansi yang lain, belum lagi penempatan aparat yang belum sesuai dengan harapan baik itu dari tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang masih minim menjadi pemicu ketidakmaksimalan aparat dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya sangat berdampak pada kemampuan lembaga Bappeda baik itu secara teknis, analitis, administrasi, maupun komunikasi dalam mendukung program/kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang hingga saat ini dinilai belum mampu mengakomodir usulan masyarakat.

Badan perencanaan pembangunan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun teknis perencanaan pembangunan, hendaknya meningkatkan kapasitas aparturnya agar mampu melaksanakan tugasnya secara teknis, administrasi, analitis, dan mampu berkomunikasi secara, serta menempatkan aparturnya sesuai dengan keterampilan yang dimiliki untuk ditugaskan di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana mengakomodasi aspirasi sekaligus mendukung upaya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari aktor pembangunan. selain itu juga Bappeda tetap terus menjaga koordinasi antar stakeholder agar tetap berjalan harmonis. Selain itu Lembaga harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin media teknologi informasi sebagai sarana komunikasi semua stakeholder dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Adminitrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berman, T. (2017). *Publik Participation as a Tool For, Planning, Participation, and Knowledge*. Israil: Department of Geography and Human Environment.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Disign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif & Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. USA: Prentice-Hall, Inc., Englewood.
- Efendhi, M. (2016). *Organisasi Tata Laksanan dan Lembaga Kearsipan*. Universitas Terbuka.
- Faludi, A. (1973). *Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press.
- Gerspacher, N., Hanlon, Q., & Weiland, M. N. (2017). *Sustainable capacity building: Guidelines for planning and project design communities*. USA: Institute of Peace.
- Hadi, S. P. (2014). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mackay, A. (2007). *Motivation, Ability and Confidence Building in People*. Butterworth-Heinemann

- Mcmurray, P. (2019). *Power, Politics and Exclusion in Organization and Management*. London: Rouledge.
- Maleong, L. J. (2004). *Metedologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Miles, M. B & Huberman, M. A., & Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Manninen, R. L., & Viitala, R. (2007). *Competence management and human resource development*. USA: Haaga Helia.
- Muluk, M. R. K. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Nugroho, W. (2011). *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rangriz, H., & Soltanieh, F. (2015). Exploring the effects of organisational capabilities and managerial competencies on the organisational effectiveness. *Journal of Strategic Human Resource Management*, 4(2).
- Salaman, G., & Asch, D. (2003). *Strategy and Capability Sustaining Organizational Change*. Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Saleh, C., Islamy, M. I., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2013). *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*. Malang: UB Press.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Theresia, A. K., Nugraha, P. G., & Mardikanto, T. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.